



Domestikasi Berbalut Pemberdayaan Perempuan Pada Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (Krpl) Di Kabupaten Sidoarjo

Munari Kustanto

Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract

The problem of food security is becoming one of the important issues not only in Indonesia but also in the world. This is apparent from the lifting of the food problem as one of the SDGs intention. In an effort to realize food security the Government initiate activities KRPL with women as the target. The empowerment strategy is carried in this activity indicated by not freeing women but instead perpetuate the hegemony patriarkhi. This research seeks to elaborate on how the culture works with patriarkhi wrap women's empowerment in KRPL to perpetuate its hegemony through domestication. This research used the qualitative approach, both in gathering techniques as well as data analysis. The required data in the study gained through the study of literature and in-depth interviews. Empowerment activities in KRPL carried no more patriarkhi culture in an effort to perpetuate its hegemony. Practices KRPI on the field it is push on a domestication against women. Construction on the role of women in domestic activities are supported by regulations that underlies KRPL implementation. Domesticated which happens to female cannot be released from the use of WID approach by the government.

Abstrak

Masalah keamanan pangan menjadi salah satu isu penting tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Hal ini terlihat dari pencabutan masalah pangan sebagai salah satu tujuan SDG. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan pemerintah memprakarsai kegiatan KRPL dengan perempuan sebagai target. Strategi pemberdayaan dilakukan dalam kegiatan ini ditunjukkan dengan tidak membebaskan perempuan namun malah menganut hegemoni patriarkhi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana budaya bekerja dengan patriarkhi membungkus pemberdayaan perempuan di KRPL untuk mengabadikan hegemoninya melalui domestikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, baik teknik pengumpulan maupun analisis data. Diperlukan data dalam penelitian yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Kegiatan pemberdayaan di KRPL tidak lagi membawa budaya patriarkhi dalam upaya melestarikan hegemoni. Praktik KRPI di lapangan ini mendorong domestikasi melawan perempuan. Konstruksi peran perempuan dalam kegiatan rumah tangga didukung oleh peraturan yang mendasari pelaksanaan KRPL. Diketahui yang terjadi pada perempuan tidak dapat dilepaskan dari penggunaan pendekatan WID oleh pemerintah.

Keywords: domesticated, KRPL, women empowerment, construction of the role, WID

DOI: 10.22515/bg.v2i1.666

Coressponding author

Email: munarikustanto@gmail.com

Pendahuluan

Permasalahan pangan menjadi salah satu isu penting bukan hanya di Indonesia tetapi sudah menjadi isu global. Diangkatnya permasalahan pangan dalam salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi bukti kuat bahwa permasalahan pangan sudah menjadi isu global. Dalam tujuan SDGs nomor dua, target yang hendak dicapai adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan pada tahun 2030. Komitmen yang berisi seperangkat tujuan transformatif ini sudah disepakati dan berlaku bagi seluruh negara di dunia tanpa terkecuali, termasuk Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan tujuan kedua dalam komitmen global tersebut, pemerintah Indonesia menjadikan pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga sebagai sasaran dan tujuan pemantapan ketahanan pangan baik di daerah maupun nasional. Pemerintah sangat menyadari bahwa ketahanan pangan tidak dapat hanya mengandalkan cukupnya ketersediaan pangan di tingkat nasional maupun daerah. Selanjutnya yang harus diperhatikan pula adalah terpenuhinya kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga atau individu.

Memperhatikan hasil Sensus Pertanian Tahun 2013, ketahanan pangan penduduk perdesaan yang mencerminkan masyarakat pertanian hanya 23,39%. Prevalensi tidak tahan pangan mencapai 76,61% dengan rincian rentan pangan (40,31%), rawan pangan (24,21%) dan kurang pangan (12,08%). Capaian prevalensi rentan pangan yang cukup tinggi mengindikasikan status ketahanan pangan berisiko tinggi. Penduduk yang berada pada kondisi rentan dan rawan pangan berpotensi menjadi kurang pangan. Maluku dan Papua menjadi wilayah dengan kondisi terparah, di mana penduduk tahan pangan hanya 16,73% sementara prevalensi rawan pangan mencapai 40,76%. Sulawesi menjadi wilayah dengan tingkat tahan pangan tertinggi (29,50%), sedangkan Jawa menjadi wilayah dengan prevalensi kurang pangan terendah (11,71%) (Badan Pusat Statistik, 2015).

Indikator lain yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan. Pemerintah menargetkan skor PPH Ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019, adapun capaian skor PPH Ketersediaan pada tahun 2015 baru mencapai 89,69 (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2016) Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan LAKIP Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, capaian PPH Provinsi Jawa Timur baru pada angka 82,70. Capaian tersebut belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 83,30. Kondisi tersebut jika dibandingkan dengan kabupaten Sidoarjo relatif masih lebih bagus. Berdasarkan LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2015, realisasi skor PPH pada tahun 2015 hanya sebesar 48,13. (*Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2015*”, 2015)

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan pemerintah melaksanakan Program Percepatan Penganekaragaman Pangan (P2KP). Dalam program tersebut, diversifikasi pangan menjadi poin penting. Implementasi program tersebut salah satunya berupa kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan gizi dan pangan keluarga serta masyarakat. Pemenuhan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan lestari secara optimal.

Memperhatikan kondisi ketahanan pangan di kabupaten Sidoarjo yang mengkhawatirkan, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah meningkatkan implementasi KRPL, karena kegiatan ini yang lebih realistis untuk dicapai. Melalui kegiatan ini masyarakat didorong memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami tanaman konsumsi pangan.

Setidaknya terdapat tujuh desa di kabupaten Sidoarjo yang dijadikan pusat kegiatan KRPL. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dalam memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Salah satunya adalah membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Perempuan berdasarkan penjelasan di atas, terlihat menjadi objek penting dalam pelaksanaan KRPL. Berbagai peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan KRPL mulai dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 hingga Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Sidoarjo semakin mempertegas posisi perempuan dalam kegiatan ini. Perempuan dalam berbagai peraturan yang ada menjadi sasaran utama dalam KRPL. Model pemberdayaan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga berpotensi mengalami bias gender. Secara ekstrinsik dari peraturan tersebut di atas, terlihat bahwa perempuan dianggap paling bertanggungjawab dan memegang peranan penting dalam pemenuhan pangan keluarga.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bias gender dalam kegiatan KRPL, di mana salah satunya adalah terdapat indikasi terjadi domestikasi melalui pemberdayaan perempuan yang dilakukan. Pemberdayaan perempuan yang diusung KRPL dalam implementasinya diindikasikan sebagai proses memposisikan perempuan dalam ranah domestik. Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah agar kegiatan KRPL lebih baik dan tidak bias gender.

Studi yang mengangkat perempuan dalam kaitannya dengan ketahanan pangan sudah cukup banyak. Penelitian dengan judul 'Kapasitas Perempuan Tani untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga dalam Menghadapi Era Globalisasi di Kota Pekanbaru' salah satunya. Penelitian ini salah satunya bertujuan untuk mengetahui kapasitas perempuan

tani untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dalam menghadapi era globalisasi di kota Pekanbaru. Menggunakan pendekatan kuantitatif penelitian menunjukkan bahwa kapasitas perempuan tani masih rendah dalam pengolahan pangan. Kondisi ini terjadi karena dalam memilih jenis pangan yang dikonsumsi hanya berdasarkan ketersediaan pangan di wilayahnya dan berdasarkan kebiasaan makan. Pemberdayaan masyarakat tani dipercaya dapat mengatasi ancaman globalisasi terhadap ketahanan pangan di kota Pekanbaru (Suryani, 2016).

Studi yang membahas permasalahan pemberdayaan perempuan dan ketahanan pangan juga dapat dilihat pada penelitian dengan judul '*Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Agribisnis di Kawasan Bandungan*'. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan aksesibilitas kaum perempuan di bidang agribisnis dalam meningkatkan ketahanan pangan di kawasan Bandungan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa model pemberdayaan perempuan masih bersifat parsial. Dalam hal ini masih belum terintegrasikan atau berkembang di lembaga/intitansi kemasyarakatan yang ada di Bandungan. Akses perempuan dalam sumberdaya dan pendapatan relatif seimbang. Adapun pengelolaan pemanfaatan biaya produksi dan kebutuhan hidup lebih dominan perempuan. Akses pemanfaatan waktu luang bagi perempuan relatif rendah, karena dominasi kegiatan domestik (Marliyah, 2013, p. 24-33).

Kedua studi sebelumnya masih terbatas mengulas keterkaitan antara gender dengan ketahanan pangan. Penelitian tersebut belum mengulas lebih jauh implikasi praktik pemberdayaan yang dilakukan terhadap perempuan. Tulisan ini akan lebih mengulas indikasi pemberdayaan yang dilakukan melalui KRPL dalam kaitannya dengan proses domestikasi.

Beberapa studi yang secara spesifik membahas domestikasi perempuan juga sudah ada. Salah satunya penelitian dengan judul '*Representasi Domestikasi Perempuan dalam Iklan*'. Melalui analisis semiotika, representasi perempuan dalam iklan diulas dalam penelitian ini. Iklan dalam tabloid *Nova* dan *Nyata* edisi minggu ketiga bulan Februari-April 2011 menjadi fokus dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam iklan di tabloid *Nova* dan tabloid *Nyata* cenderung merepresentasikan perempuan dengan tema dan cara yang bias gender. Tema dan cara perempuan direpresentasikan dalam iklan tidak jauh dari pencitraan perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga serta sebagai penarik pandang (Siswati, 2014, p. 179-194).

Artikel yang mengulas tentang domestikasi dalam kaitannya dengan agama telah pula dilakukan. Artikel dengan judul '*Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender*' berusaha menguraikan kedudukan perempuan dalam ranah domestik dan publik dari perspektif gender sesuai normatisme Islam. Dalam tataran normatisme Islam, secara

skematis tidak diatur wilayah perempuan dan laki-laki. Islam menyisakan wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan yang senantiasa berkembang. Ketika perempuan tidak mengemban tugas kodrati, maka memiliki kebebasan berprofesi di ranah publik. Tugas-tugas kerumahtanggaan seperti mencuci piring, mendidikan anak dan lain-lain tidak mengenal batasan jenis kelamin. Perempuan dalam hal ini tidak boleh dituntut memberikan pelayanan di meja makan, kecuali dengan sukarela. Hal ini untuk menghindari *double burden* (beban ganda) yang sering dialami perempuan (Intan, 2014, p. 1-16).

Domestikasi perempuan yang dibahas dalam kedua studi di atas masih belum mengulas keterkaitan gender dengan masalah ketahanan pangan. Domestikasi masih dilihat sebagai representasi dari media dan interpretasi yang kurang tepat terhadap agama. Tulisan ini berusaha menguraikan domestikasi terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan untuk memenuhi ketahanan pangan keluarga.

Selanjutnya studi yang menjadikan KRPL sebagai fokus pembahasan sudah banyak pula dilakukan, salah satunya penelitian dengan judul '*Pengaruh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam Mendukung Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga*'. Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ini bertujuan (1) menganalisis sejauh mana program KRPL mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga di Kelurahan Rejomulyo, (2) menganalisis seberapa besar perubahan pola konsumsi pangan rumah tangga kawasan KRPL berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH), (3) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi diversifikasi pangan (PPH). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pendapatan usaha tani pekarangan peserta KRPL berbeda nyata dengan pendapatan usaha tani pekarangan non peserta KRPL. Perbedaan pendapatan untuk peserta KRPL sebesar Rp 644,753,-/tahun sedangkan untuk non peserta KRPL sebesar Rp 349,818,-/tahun; (2) terdapat perbedaan skor PPH antara peserta KRPL (80,53) dan non peserta KRPL (62,32); dan (3) faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat skor PPH adalah variabel peserta/non Peserta KRPL, jumlah anggota keluarga, dan luas pekarangan (Annisahaq, 2014, p. 32-39).

Bahkan studi tentang KRPL dengan mengambil lokasi di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terlihat pada penelitian dengan judul '*Partisipasi Masyarakat dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Sebani, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur*'. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam program KRPL di desa Sebani, kecamatan Tarik, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat yang diberikan sering atau masuk kriteria tinggi. Variabel yang memiliki nilai persentase tertinggi adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil (60,65%), partisipasi dalam pelaksanaan (51,23%), selanjutnya partisipasi dalam pengambilan keputusan (44,27%), dan yang terakhir partisipasi dalam pengawasan (41,15%) (Putri & Muhammad Farid Ma'rif,

2015, p. 1-10).

Beberapa studi yang sudah dilakukan, memperlihatkan bahwa belum terdapat satupun penelitian yang memfokuskan pembahasan domestikasi pada kegiatan KRPL. Beberapa studi tentang KRPL umumnya memfokuskan pembahasan pada dampak KRPL maupun bentuk partisipasi masyarakat. Tulisan ini dengan demikian berusaha mengisi ruang kosong yang masih ditinggalkan beberapa studi sebelumnya.

Permasalahan domestikasi dalam KRPL menjadi menarik untuk dibahas mengingat dalam pelaksanaannya menggunakan pemberdayaan perempuan sebagai pembungkus. Kontradiksi terjadi ketika pemberdayaan yang sedianya dapat membebaskan perempuan dari belenggu patriarki malah secara tidak langsung melanggengkan hegemoni patriarki terhadap perempuan. Fokus penelitian ini berusaha menguraikan bagaimana budaya patriarki bekerja dengan balutan pemberdayaan perempuan dalam KRPL untuk melanggengkan hegemoninya melalui domestikasi. Semangat pemberdayaan yang diusung dalam KRPL dengan demikian diharapkan benar-benar dapat memberdayakan perempuan, bukan malah sebaliknya melanggengkan hegemoni patriarki, sehingga manfaat KRPL benar-benar dapat dirasakan oleh perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, baik dalam teknik pengumpulan maupun analisis data. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan untuk mengidentifikasi peraturan KRPL yang dapat dijadikan dasar domestikasi dan membalutnya dengan pemberdayaan. Dalam upaya memperoleh data dan informasi untuk menjawab fokus penelitian secara utuh dan mendalam maka perlu dilakukan wawancara mendalam. Menggunakan pedoman wawancara, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang mengawal implementasi KRPL di kabupaten Sidoarjo menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini adalah pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) kabupaten Sidoarjo.

Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis dengan menelaah seluruh data yang tersedia. Data yang telah ditelaah tersebut kemudian dilakukan reduksi data sebelum disajikan. Selanjutnya pada tahap akhir berdasarkan data tersebut kemudian dilakukan verifikasi untuk ditarik kesimpulan.

Strategi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Sebagai salah satu program ketahanan pangan pemerintah, maka pelaksanaan KRPL membutuhkan adanya aturan. KRPL sebagai salah satu wujud implementasi dari P2KP dengan demikian memiliki dasar hukum yang sama. Dalam hal ini adalah Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis

Sumber Daya Lokal.

Temuan yang sangat menarik adalah terkait dengan strategi untuk penganeekaragaman konsumsi pangan. Strategi internalisasi sebagaimana tercantum dalam poin B3, secara eksplisit menyebutkan perempuan sebagai faktor utama dalam strategi ini. Redaksional strategi internalisasi secara lengkap adalah sebagai berikut :

*Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganeekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang penganeekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, **terutama wanita** sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang.*

(Lampiran Perpres Nomor 22 Tahun 2009, poin B3).

Redaksi di atas memperlihatkan bahwa pola makan keluarga merupakan tanggung jawab perempuan. Pengetahuan perempuan tentang keanekaragaman konsumsi pangan menjadi kunci bagi ketahanan pangan keluarga. Nuansa hegemoni patriarki sebenarnya sudah terasa pada tataran ini.

Strategi yang tertuang dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2009 kemudian menjadi pedoman bagi pelaksanaan program di lapangan, termasuk KRPL. Pemberian tanggung jawab kepada perempuan untuk membentuk pola konsumsi pangan yang beragam menjadi semacam kata kunci. Hal ini terlihat pula dalam peraturan pelaksanaan program penganeekaragaman pangan di daerah.

Salah satunya adalah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Sidoarjo. Peraturan ini berisikan pedoman pelaksanaan program P2KP, di mana salah satu implementasinya berupa KRPL. Melalui pendekatan pemberdayaan perempuan (dalam peraturan tersebut disebut dengan Kelompok Wanita), salah satu strategi yang digunakan adalah internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan. Pemberian beban dan tanggung jawab kepada perempuan lagi-lagi sangat terasa. Pada strategi internalisasi disebutkan pada poin kedua bahwa proses internalisasi difokuskan pada kegiatan dengan sasaran perempuan sebagaimana redaksi berikut:

- a. *Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan nonformal untuk seluruh lapisan masyarakat **khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK** dalam rangka merubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;*
- b. *Penyuluhan kepada **ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui***

dan wanita subur tentang manfaat mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

(Lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011).

Nuansa hegemoni budaya patriaki lagi-lagi dapat dirasakan pada redaksional peraturan yang menjadi pedoman umum pelaksanaan kegiatan KRPL di kabupaten Sidoarjo. Terlihat dari adanya penekanan bahwa kesuksesan dari pelaksanaan penganeekaragaman pangan melalui KRPL sangat bergantung kepada peran perempuan. Sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan kegiatan, maka secara tidak langsung peraturan tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pelaksanaan di lapangan.

Salah satu bukti terlihat dalam pelaksanaan kegiatan KRPL di desa Sebani, kecamatan Tarik, kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan studi yang dilakukan (Putri & Muhammad Farid Ma'ruf, 2015) peserta KRPL mayoritas adalah perempuan. Tercatat sebanyak 98% peserta KRPL berjenis kelamin perempuan yang mewakili masing-masing keluarga. Selanjutnya sisanya sebesar 2% berjenis kelamin laki-laki, yaitu Kepala Desa Sebani yang aktif menggerakkan masyarakat. Andaikata Kepala Desa Sebani adalah seorang perempuan, maka dapat dipastikan kegiatan tersebut seluruhnya dilaksanakan oleh perempuan.

Pedoman pelaksanaan KRPL yang menjadikan perempuan sebagai sasaran utama juga memiliki keterkaitan dengan pandangan pengawal kegiatan di lapangan. Dalam hal ini adalah aparaturnya dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Sidoarjo. Selain menjelaskan bahwa kegiatan KRPL yang menjadikan perempuan sebagai sasaran utama karena adanya ketentuan dari pusat, tetapi juga masalah ketahanan pangan keluarga sudah menjadi tugas perempuan.

"...ya karena mereka yang paling mengerti mas tentang kebutuhan pangan keluarganya..."

Informan juga menegaskan bahwa laki-laki kurang memiliki kepedulian terhadap permasalahan pangan keluarga karena merasa bukan tanggung jawab mereka.

"sasaran kegiatan ini mengambil ibu-ibu karena ibu-ibulah yang sangat setiap hari mengurus permasalahan pangan keluarga. Kalau bapak-bapak kan kurang terlalu peduli karena mereka yang mencari uang kan?..."

Sekilas hal tersebut tidak menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Akan tetapi, jika ditelaah lagi, ketika membicarakan permasalahan keluarga termasuk juga urusan ketahanan pangan tentunya tidak dapat lepas dari peran orangtua. Dalam sebuah keluarga, umumnya yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu. Pembebanan permasalahan ketahanan pangan kepada perempuan (ibu) tentunya menunjukkan terjadinya ketimpangan gender dalam kegiatan KRPL.

Sebagaimana diketahui permasalahan ketahanan pangan keluarga yang menjadi poin penting dalam kegiatan KRPL tidak terkait dengan kodrat alamiah. Perempuan dan laki-laki sebagai orang tua pada sebuah keluarga mempunyai tanggung jawab yang sama terkait permasalahan yang dihadapi keluarga, termasuk ketahanan pangan. Pemberian beban tanggung jawab ketahanan pangan hanya kepada seorang perempuan (ibu) menunjukkan adanya konstruksi peran sosial oleh masyarakat yang bias gender.

Hegemoni Patriarki sebagai Budaya Pemberdayaan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari

Memperhatikan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa pemberdayaan yang diusung dalam kegiatan KRPL tidak lebih sebagai upaya budaya patriarki melanggengkan hegemoninya. Negara sebagai institusi utama dalam pelegitimasi hegemoni patriarki, hal ini terlihat dari peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan KRPL. Dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, khususnya lampiran yang memuat strategi, memperlihatkan bagaimana pandangan negara terhadap perempuan yang masih bias gender. Negara menganggap perempuan sosok yang tepat untuk menangani permasalahan rumah tangga termasuk dalam hal ini ketahanan pangan.

Pandangan negara yang sangat bias gender tersebut terlihat dari penekanan yang tertuang dalam peraturan. Perempuan dianggap menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab mengenai permasalahan ketahanan pangan keluarga. Penekanan pada kalimat '*terutama wanita*' pada strategi internalisasi dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2009 memperlihatkan pandangan negara terhadap perempuan. Negara secara tidak langsung mengamini konstruksi yang ada selama ini, bahwa perempuan merupakan sosok pemelihara dan rajin sehingga sesuai untuk mengurus rumah tangga.

Permasalahan ketahanan pangan keluarga—termasuk penganekaragaman konsumsi pangan di dalamnya—pada satu sisi dipandang negara berada dalam ranah urusan rumah tangga. Perempuan dengan demikian oleh negara dipandang sebagai pihak yang paling dapat bertanggung jawab dalam permasalahan ketahanan pangan keluarga. Semangat ini selanjutnya diinduksi ke dalam berbagai strategi pelaksanaan KRPL, termasuk di kabupaten Sidoarjo.

Nuansa bias gender juga terlihat dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Sidoarjo. Pengkhususan sasaran kegiatan KRPL kepada perempuan tentu tidak dapat dilepaskan dari Perpres Nomor 22 Tahun 2009 yang bias gender. Kondisi ini semakin diperparah dengan *mindset* para pengambil kebijakan yang patriarkal sehingga berakibat kepada relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Mindset para pengambil kebijakan yang bias gender dapat dilihat dari pendapat mereka mengenai alasan perempuan sebagai sasaran kegiatan KRPL. Sebagaimana dikemukakan di atas, informan sebagai salah satu pejabat yang menangani kegiatan ini mengungkapkan alasan penunjukkan perempuan, karena merekalah yang paling memahami kebutuhan pangan keluarga. Kondisi ini memperlihatkan relasi yang tidak seimbang, di mana perempuan dianggap sebagai subordinat dari laki-laki.

Membicarakan permasalahan keluarga, termasuk urusan ketahanan pangan keluarga tentunya tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak saja. Permasalahan ketahanan pangan keluarga merupakan salah satu tugas pokok orang tua. Dalam sebuah keluarga yang dimaksud dengan orang tua adalah ibu (perempuan) dan bapak (laki-laki). Dengan demikian permasalahan ketahanan pangan keluarga tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak saja, baik perempuan maupun laki-laki.

Menurut Young, kapitalisme yang menjadikan kondisi tersebut terjadi di masyarakat. Salah satu karakteristik kapitalisme menurutnya adalah marginalisasi terhadap perempuan yang berfungsi sebagai kekuatan sekunder, baik secara esensial maupun fundamental (Tong, 2009, p. 181). Kapitalisme dengan demikian secara esensial dan fundamental merupakan perwujudan budaya patriaki. Melalui struktur gender yang sangat bias tersebut, terjadilah pemisahan jenis pekerjaan bergaji dengan pekerjaan rumah tangga (*domestic work*). Kapitalisme pula yang mendesak perempuan untuk menjalankan pekerjaan domestik dan seringkali dianggap tidak produktif.

Pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan dianggap tidak produktif semata-mata karena tidak menghasilkan uang. Permasalahan ketahanan pangan keluarga dalam hal ini dianggap berada dalam ranah domestik. Adapun pekerjaan produktif merupakan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. Dalam hal ini adalah pekerjaan-pekerjaan di sektor publik yang biasanya menjadi domain laki-laki. Dikotomi pembagian pekerjaan oleh kapitalisme tersebut menjadikan perempuan kurang dihargai dalam bekerja.

Relasi sosial yang tidak seimbang tersebut tercermin dalam dikotomi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Dikonstruksi sebagai pekerja publik, maka pada laki-laki melekat sebutan sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga. Sebaliknya perempuan dikonstruksi sebagai pekerja domestik dengan sebutan ibu rumah tangga. Kondisi tersebut membawa konsekuensi bagi perempuan yang ter subordinat oleh laki-laki. Hegemoni laki-laki terhadap perempuan dapat dilihat dari pembagian kerja pada lembaga bernama keluarga. Permasalahan ketahanan pangan merupakan pekerjaan yang melekat pada peran ibu rumah tangga.

Menggunakan analisis pembagian kerja dari Young, maka terlihat bahwa penunjukkan perempuan sebagai sasaran KRPL sangat bias gender. Perempuan ditunjuk karena mereka dianggap yang paling memahami permasalahan domestik, dalam hal ini ketahanan pangan

keluarga. Meskipun membalutnya dengan istilah pemberdayaan, sejatinya yang terjadi adalah proses domestikasi dalam kegiatan KRPL. Pemberdayaan yang diusung dalam kegiatan KRPL hanya sebatas melibatkan perempuan dalam pelaksanaannya. Adapun substansi yang terkandung berdasarkan asumsi penetapan perempuan sebagai sasaran sarat bias gender. Dalih pemberdayaan yang diusung dalam KRPL tidak lebih merupakan upaya memberi beban domestik kepada perempuan.

Bentuk pemberian beban domestik kepada perempuan terlihat dalam strategi kegiatan, di mana perempuan didorong untuk memanfaatkan pekarangan secara optimal. Sebagai pihak yang sangat mengetahui kebutuhan pangan keluarga, maka perempuan diberi tanggung jawab untuk mengoptimalkan pekarangan yang ada. Dalam hal ini penentuan jenis tanaman yang dibutuhkan untuk pemenuhan pangan keluarganya. Perempuan yang setiap hari sudah dibebani aktivitas domestik seperti mengurus kebutuhan suami dan anak, juga harus mengurus pekarangan sebagai sumber kebutuhan pangan keluarga.

Melalui konstruksi peran gender bahwa perempuan sebagai pengelola rumah tangga, maka mereka harus menanggung beban kerja domestik lebih lama dan lebih banyak. Konstruksi peran gender tersebut kemudian diperkokoh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang bias gender mengakibatkan hegemoni budaya patriaki semakin terpelihara. Dalam masyarakat kemudian terbentuk suatu keyakinan bahwa pelaksanaan seluruh aktivitas domestik merupakan tanggung jawab perempuan. Peran gender tersebut kemudian diinternalisasi hingga dapat memunculkan rasa bersalah bagi perempuan ketika tidak dapat melaksanakan aktivitas domestik tersebut. Sebaliknya aktivitas domestik bagi laki-laki bukan menjadi tanggung jawabnya. Bahkan banyak tradisi yang melarang keterlibatan laki-laki dalam aktivitas domestik.

Pemberdayaan yang diusung dalam kegiatan KRPL pada kenyataannya hanya sebatas pelibatan perempuan dalam sebuah kegiatan. Kondisi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari perspektif pembangunan gender yang digunakan pemerintah. Umumnya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih menggunakan pendekatan *Women in Development* (WID). Penekanan dalam perspektif ini adalah keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan.

Dipilihnya pendekatan WID dalam pembangunan gender di Indonesia tampaknya kurang memberikan dampak. Hegemoni budaya patriaki ternyata masih belum dapat ditaklukkan dengan pendekatan ini. Masyarakat, terlebih pengambil kebijakan hanya memahami pembangunan gender sebatas melibatkan perempuan-perempuan dalam pembangunan. Apakah pembangunan tersebut memberikan keuntungan bagi perempuan dan benar-benar dibutuhkan oleh perempuan belum menjadi pertimbangan.

Pendapat informan mengenai pembangunan gender di kabupaten Sidoarjo semakin memperkuat asumsi di atas. Ketika dikonfirmasi mengenai keterkaitan KRPL dan

pembangunan gender, informan memberikan keterangan sebagai berikut:

“Jelas kita sudah mendukung pembangunan gender mas, buktinya kegiatan yang kita laksanakan kan sasarannya perempuan...”

Tentunya dapat dibayangkan jika mindset yang kurang tepat mengenai pembangunan gender tersebut masih mendominasi. Keberhasilan pembangunan gender hanya diukur berdasarkan sejauh mana perempuan terlibat. Konsep pemberdayaan yang diusung pastinya akan menjadi sangat dangkal. Bernarkah pemberdayaan tersebut dapat menjadikan perempuan menjadi lebih berdaya jika tolak ukurnya hanya sebatas keterlibatan.

Dalam tataran global, pendekatan WID dianggap gagal dalam membebaskan perempuan dari ketidakadilan dan diskriminasi (Fakih, 2002, p. 169). Banyak program yang sudah dilakukan dengan pendekatan ini ternyata memberikan dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Kondisi ini juga terlihat dalam kegiatan KRPL, sebuah program yang sedianya diharapkan mampu memberdayakan perempuan malah berkebalikan. Dalam praktiknya KRPL malah mendorong terjadinya domestikasi terhadap perempuan dengan pemberian beban ganda.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka terlihat bahwa pemberdayaan yang diusung dalam KRPL tidak lebih hanya sebuah upaya melanggengkan hegemoni patriaki. Melalui balutan pemberdayaan, praktik KRPL nyatanya malah mendorong terjadinya domestikasi terhadap perempuan. Peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan KRPL semakin memperkokoh konstruksi mengenai peran gender perempuan. Ketahanan pangan keluarga sebagai salah satu wujud aktivitas domestik menjadi tanggung jawab perempuan. Mereka dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui permasalahan kebutuhan dan ketahanan pangan keluarga. Sebagai sebuah institusi, permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan tetapi tanggung jawab orangtua. Dalam hal ini adalah tanggung jawab laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu. Pembebanan aktivitas domestik kepada perempuan tidak dapat dilepaskan dari pendekatan WID yang digunakan pemerintah. Keberhasilan pembangunan gender hanya diukur dari keterlibatan perempuan. Akibatnya pemberdayaan perempuan hanya menjadi hiasan tanpa memberikan dampak yang sangat signifikan bagi relasi gender yang seimbang.

Referensi

- Annisahaq, A. dkk. (2014). "Pengaruh Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Mendukung Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga." *Habitat*, 25(1), 32–39.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Analisis Tematik ST2013 Subsektor Ketahanan Pangan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fakih, M. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Intan, S. (2014). Kedudukan Perempuan Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, 3(1).
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2016). *Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015*. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2015*. (2015). Sidoarjo: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Marliyah, L. dkk. (2013). "Model Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Agribisnis di Kawasan Bandungan." *Majalah Ilmiah Pawiyatan* 20, 3, 24–33.
- Putri, M. R., & Muhammad Farid Ma'ruf. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Sebani, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. *Publika*, 4(7).
- Siswati, E. (2014). "Representasi Domestikasi Perempuan Dalam Iklan". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11, 2, 179–194.
- Suryani, P. dan A. D. (2016). "Kapasitas Perempuan Tani Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Dalam Menghadapi Era Globalisasi di Kota Pekanbaru." *Marwah*, 15(1), 62–77.
- Tong, R. P. (2009). *Feminist Thought : Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.

